



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN TIKET KERETA MUDIK LEBARAN 2025

Ulayya Sarfina

Analisis Legislatif Ahli Pertama
ulayya.sarfina@dpr.go.id

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menjelang mudik Lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya dalam transportasi kereta api. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan tiket dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Meskipun terdapat penyesuaian dalam alokasi anggaran, alokasi subsidi *Public Service Obligation* (PSO) untuk tiket kelas ekonomi tetap dipertahankan. Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran PSO tahun 2025 untuk kereta api adalah sebesar Rp4,79 triliun. Dari PSO tersebut di antaranya dialokasikan untuk mendukung ketersediaan tiket mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap layanan transportasi publik, terutama bagi sebagian masyarakat yang akan menggunakan kereta api sebagai moda utamanya.

Selain kebijakan tarif, pemerintah menyiapkan penambahan perjalanan kereta api untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Kemenhub dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berkoordinasi dalam menyiapkan perjalanan tambahan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut kereta selama periode mudik. Penjualan tiket juga dibuka lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya dengan tujuan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudiknya. Kebijakan ini memudahkan KAI dalam mengevaluasi keterisian 2.877.473 tempat duduk yang telah tersedia untuk perjalanan kereta api reguler pada periode 21 Maret hingga 11 April 2025. Diharapkan ketersediaan tiket bagi pemudik dapat lebih terjamin sekaligus mengurangi kepadatan penumpang di perjalanan. Perencanaan penambahan perjalanan juga lebih mudah dilakukan dengan penyesuaian kapasitas perkeretaapian.

Tingginya permintaan tiket masih memiliki tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, tiket habis dalam waktu singkat setelah penjualan dibuka. Situasi ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai potensi praktik percaloan yang dapat berdampak pada ketersediaan tiket bagi masyarakat umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhub dan KAI menerapkan beberapa upaya, seperti pembatasan jumlah tiket yang dapat dibeli dalam satu transaksi serta peningkatan sistem pemantauan dalam proses pemesanan. Selain itu, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi tiket, langkah hukum akan diambil guna memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan akses yang adil terhadap tiket mudik.

Di luar aspek ketersediaan tiket, kesiapan infrastruktur dan operasional juga menjadi perhatian utama. Lonjakan jumlah penumpang selama periode mudik menuntut kesiapan sarana dan prasarana, baik di stasiun maupun sepanjang jalur perjalanan. Stasiun-stasiun utama dipersiapkan agar dapat mengakomodasi lonjakan penumpang dengan lebih baik. Begitu pula dengan operasional perjalanan kereta yang diupayakan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan kenyamanan. Berbagai perbaikan dan penyesuaian terus dilakukan agar gangguan operasional dapat diminimalkan selama arus mudik berlangsung.

Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengelola tingginya permintaan tiket serta potensi praktik percaloan, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan transportasi publik yang inklusif dan merata, antara lain dengan mempertahankan subsidi PSO, menambah perjalanan kereta, serta memperketat pengawasan terhadap distribusi tiket. Langkah-langkah antisipatif yang telah disiapkan diharapkan mampu mengurangi kendala yang ada. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini akan terus dilakukan agar sistem transportasi kereta api semakin optimal dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode mudik.

Atensi DPR

Komisi V DPR RI memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik Lebaran 2025, salah satunya dengan moda kereta. Komisi V DPR RI mendorong penyempurnaan regulasi yang mendukung ketersediaan dan keterjangkaun harga tiket kereta untuk mudik Lebaran 2025, serta peningkatan layanan bagi masyarakat. Komisi V DPR RI turut memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun, termasuk subsidi *Public Service Obligation* (PSO) dan penambahan jadwal perjalanan kereta api, dapat berjalan secara optimal sesuai sasaran untuk kebutuhan publik. Sementara itu, dalam fungsi anggaran, Komisi V DPR RI perlu memastikan alokasi anggaran PSO dapat mendukung penyelenggaraan mudik Lebaran secara efektif dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah dan legislatif, diharapkan penyelenggaraan transportasi mudik tahun ini dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sumber

ekonomi.bisnis.com, 11 & 12 Februari 2025;
jawapos.com, 13 Februari 2025;
majalahlintas.com, 12 Februari 2025;
money.kompas.com, 12 & 13 Februari 2025;
news.detik.com, 12 Februari 2025.

Minggu ke-2 Februari
(10 s.d. 16 Februari 2025)

2025



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

EDITOR

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making